

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Inovasi KPU Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017**

KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilu merupakan salah satu KPU yang dinilai cukup berhasil dalam memberikan fasilitas bagi para pemilih penyandang disabilitas pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014, hal ini dibuktikan dengan mendapatkannya sebuah penghargaan dari KPU RI yang diberikan kepada KPU Kota Yogyakarta atas keberhasilannya dalam memfasilitasi pemilih penyandang disabilitas. KPU Kota Yogyakarta berupaya untuk dapat memenuhi semua hak-hak politik masyarakat Kota Yogyakarta serta khususnya penyandang disabilitas agar tidak ada rasa diskriminasi terhadap pemilih penyandang disabilitas. Akan tetapi masih banyak penyandang disabilitas yang tidak aktif mengisi ruang-ruang dalam berpolitik. Yang mana memang dalam pergerakannya belum satu langkah, akan tetapi berkelompok pada gerakan bersumber terhadap isu tertentu. Salah satu gerakannya yaitu sigab yang bekerjasama di empat daerah didorongnya penyandang disabilitas guna mendesain serta mengikuti pemilu baik itu pemilu legislatif maupun dalam pemilu eksekutif (Ishak Salim, 2015).

Pada pemilihan walikota Yogyakarta tahun 2017 KPU Kota Yogyakarta membuat desain dan menjadikan prioritas pemilu ini pemilu inklusif dan pada akhirnya KPU Kota Yogyakarta melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pemilu inklusif sebagai bahan dan masukan terkait hal-hal yang belum dapat

dilaksanakan pada pemilu inklusif agar pemilu kedepannya berjalan lebih baik. Berbicara mengenai pemilu inklusif tidak hanya berfokus pada penyandang disabilitas saja tetapi semua kelompok gender yang berarti semua warga Kota Yogyakarta berhak mendapatkan fasilitas yang sama, informasi yang sama, berkaitan dengan pemilihan walikota Yogyakarta 2017 serta dapat berperan aktif. Sehingga KPU Kota Yogyakarta dalam menjelaskan desain pemilu inklusif kepada seluruh warga kota Yogyakarta dimulai dari perencanaan anggaran sosialisasi bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, pada tahap awal KPU kota Yogyakarta juga mendengar aspirasi dari kaum disabilitas apa saja yang menjadi kebutuhan mereka pada pemilu yang ketika pada tahun 2014 fasilitas tersebut belum dapat dipenuhi oleh KPU kota Yogyakarta. Tidak hanya mendengar dari kaum disabilitas saja KPU kota Yogyakarta banyak berdiskusi dengan pegiat penyandang disabilitas membicarakan desain sosialisasi bagi penyandang disabilitas pada pemilu walikota Yogyakarta 2017, desain sosialisasi tersebut oleh KPU kota Yogyakarta dimasukkan dalam proses perencanaan anggaran.

Menurut Wignjosoebroto dalam Saiful Arif, dkk (2006) menegaskan bahwa terdapat arti penting sebuah persyaratan dalam eksistensi masyarakat dalam berpolitik, yang mana tidak hanya mendapatkan sebuah jaminan berupa perlindungan hak-hak namun juga adanya jaminan kemanfaatan hak-hak tersebut guna dapat membangun sebuah negara yang demokrasi, sehingga KPU mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan serta memastikan adanya pemilu yang akses. KPU Kota Yogyakarta sebagai lembaga yang menyelenggarakan

pemilu berkewajiban harus memastikan seluruh masyarakat Kota Yogyakarta khususnya penyandang disabilitas untuk dapat ikut berpartisipasi pada pilwali Kota Yogyakarta tahun 2017, dimana para penyandang disabilitas juga mempunyai hak politik yang sama. Pada Pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017 tercatat sebanyak 837 pemilih penyandang disabilitas atau sekitar 70.9% yang terdiri dari penyandang tuna daksa sebanyak 244 orang, tuna netra sebanyak 135 orang, tuna rungu/wicara 220 orang, tuna grahita 163 orang, dan disabilitas lainnya sebanyak 75 orang (KPU, 2017).

### **3.1.1 Jenis-jenis Inovasi**

#### **A. Penemuan**

Berawal dari pemilu tahun 2014 KPU Kota Yogyakarta mencoba melakukan inovasi berupa DPT difabel yang tujuannya meningkatkan partisipasi, pelayanan kepada penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk menyetarakan hak pilih bagi penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara pada saat pemilihan. Pada pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017 KPU Kota Yogyakarta membuat desain dan menjadikan prioritas pemilu ini pemilu inklusif. Dengan adanya inovasi tersebut KPU Kota Yogyakarta mendapatkan penghargaan sebagai satu-satunya KPU yang memfasilitasi disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum se-Indonesia, karena masih banyak daerah-daerah yang belum memfasilitasi kaum penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Hal ini sesuai yang disebutkan oleh ibu Rani selaku Komisioner KPUD Kota Yogyakarta dalam wawancara menyatakan sebagai berikut:

“Pada pemilihan presiden tahun 2014 KPU Kota Yogyakarta mendapatkan penghargaan dari KPU RI satu-satunya se-indonesia DIY adalah Kota/Kabupaten no 1 yang memfasilitasi penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Hal tersebut menjadi capaian bagi kami dalam melakukan evaluasi, karena kebutuhan penyandang disabilitas masih banyak yang belum mendapatkan fasilitas yang baik oleh negara pada pemilu dalam membicarakan penggunaan hak pilih.” (*Wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta tanggal 26 Januari 2018*)

KPU Kota Yogyakarta konsen pada pemilu inklusif yang berarti KPU Kota Yogyakarta sepakat bahwa negara harus memfasilitasi semua pemilih karena mempunyai hak yang sama tanpa melihat fisik dari pemilih apakah dia difabel atau tidak. KPU kota Yogyakarta mempunyai visi memastikan bahwa kinerja KPU lebih baik melalui proses-proses yang dilakukan untuk menuju pemilu inklusif.

Berikut inovasi yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemilu inklusif bagi Penyandang Difabel :

a. Alat bantu mencoblos

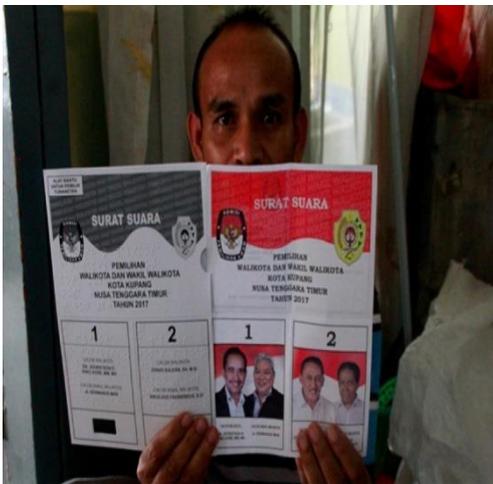
Pada pemilu Walikota dan Wakil Walikota KPU Kota Yogyakarta menyediakan alat bantu mencoblos berupa *template* sebagai upaya pemenuhan hak bagi penyandang difabel di Kota Yogyakarta yaitu dengan mengupayakan adanya alat bantu mencoblos di semua TPS yang ada pemilih penyandang difabilitas tuna netra dari hasil pemetaan yang menyebutkan adanya pemilih penyandang disabilitas tuna netra di beberapa TPS.

Alat bantu ini sangat membantu bagi pemilih difabel dalam menggunakan hak pilih pada saat pemilu sehingga asas kerahasiaan bisa dijaga. Akan tetapi bagi pemilih difabel yang tidak terbiasa dan tidak tahu cara penggunaannya akan tetap

didampingi oleh petugas KPPS atau orang kepercayaan pada saat memilih.

Hal ini disampaikan oleh ibu Rani sebagai berikut:

“Penyandang difabel tuna netra yang tidak terbiasa menggunakan alat bantu, akan didampingi oleh petugas KPPS yang berada di TPS karena ini sesuai dengan apa yang sudah kami jelaskan dalam materi bimtek kepada PPK, PPS, KPPS bahwasannya petugas yang berada di TPS harus membantu pemilih difabel tuna netra dalam menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu. (Wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta tanggal 26 Januari 2018)



**Gambar 1.1:** Surat suara pilkada, surat suara sebelah kiri untuk penyandang disabilitas dan sebelah kanan untuk umum.



**Gambar 1.2:** Penyandang disabilitas tuna netra diberi arahan oleh petugas KPPS untuk penggunaan surat suara

Adanya alat bantu coblos dengan menggunakan Braile ini sangat penting bagi pemilih penyandang difabel tuna netra karena mereka akan lebih mudah dalam memilih pasangan calon yang mereka dukung serta asas kerahasiaan suara mereka akan benar-benar terwujud.

b. TPS Yang aksesibel

Dalam mewujudkan pemilu akses dibutuhkan adanya suatu komitmen dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu serta keseriusan dari KPU Kota Yogyakarta itu sendiri dalam mewujudkan pemilu akses bagi penyandang

difabel. Salah satu yang merupakan bentuk suatu pemilu akses yaitu adalah tersedianya TPS yang aksesibel bagi pemilih difabel.

KPU Kota Yogyakarta mengakui tata ruang terbuka yang ada di Kota Yogyakarta dari tahun ketahun semakin sempit sehingga membuat petugas KPU semakin susah mencari tempat yang tepat yang akan digunakan sebagai TPS dan yang dapat menyediakan fasilitas bagi pemilih penyandang Difabel. Akibatnya TPS-TPS yang ada di Kota Yogyakarta kebanyakan menumpang di rumah Dukuh, Kelurahan dan sebagainya yang belum tentu bisa membuat TPS yang akses.

Hal ini disampaikan oleh ibu Rani sebagai berikut:

“Kami membuat peta atau data, daerah mana yang harus diperhatikan betul oleh KPU Kota Yogyakarta berkaitan dengan pemilu akses, karena adanya pemilu akses di Kota Yogyakarta dengan segala keterbatasannya, karena dikota tidak ada lahan luas yang dapat digunakan pasti berundak meskipun berundak tidak teralu parah dalam artian pemilu akses sedapat mungkin harus diwujudkan ini merupakan visi dari kami.” (*Wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta tanggal 26 Januari 2018*)

TPS yang akses merupakan hal yang krusial apabila tidak dipenuhi, apabila TPS tidak akses lalu bagaimana Difabel mengakses lokasi tersebut, apabila TPS tidak akses sudah dipastikan difabel akan kesulitan dalam menggunakan hak suaranya secara mandiri di Pemilu.

#### c. Leaflet Untuk Penyelenggara Pemilu

Inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta pada pemilu tahun 2017 dan pemilu tahun 2014 itu masih sama namun adanya peningkatan skala penyebaran templete pada pemilu tahun 2017. Para penyelenggara pemilu diberikan Leaflet oleh KPU Kota Yogyakarta agar dapat memastikan para petugas

KPPS yang berada di TPS memberikan pelayanan serta fasilitas dengan baik bagi para pemilih Difabel. Sebagai wujud dari pelaksanaan pada materi Bimtek untuk memenuhi kewajiban dari KPPS maka dari itu KPU Kota Yogyakarta membuat selebaran yang berisikan apa saja yang harus dilakukan oleh KPPS seperti adanya TPS yang aksesibel sampai adanya sebuah sanksi bagi para petugas KPPS yang membocorkan hak pilih dari pemilih difabel yang mereka dampingi. Kemudian Leaflet tersebut disebar ke seluruh PPK, PPS serta KPPS se Kecamatan Kota. Hal ini disampaikan oleh ibu Rani sebagai berikut:

“Kami melakukan bimtek kepada PPK, PPS, KPPS. Pada materi bimtek tersebut kami selaku peneenggara pemilu menekankan tentang pentingnya pemilu inklusi dimana ini sangat penting bagaimana cara PPK, PPS dan KPPS melayani pemilih difabel dengan semua jenis kecacatannya. Misalnya apa yang seharusnya dilakukan KPPS ketika pemilihnya penyandang difabel tuna netra, tuna daksa, tuna rungu itu semua disampaikan oleh kami dalam materi bimtek”. (*Wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta tanggal 26 Januari 2018*)

Akan tetapi masih banyak ditemukan di lapangan petugas TPS yang masih belum *aware* dan tidak mempunyai kepekaan terhadap difabel sehingga harus adanya pengarahan yang lebih rinci dan mendasar sehingga pemahaman petugas TPS terhadap pelayanan yang baik bisa terwujud. Hal ini disampaikan oleh ibu Rani sebagai berikut:

“Kendala dalam pelaksanaan inovasi pada pemilu yaitu ada pada penyelenggara pemilu itu sendiri, dimana masih banyak penyelenggara pemilu yang belum mempunyai perspektif kesetaraan, belum semua *aware* terhadap apa yang harus dilakukan, belum semua menangkap apa yang harus dilakukan dalam melayani pemilih difabel. Dari sisi masyarakatnya pun masih banyak masyarakat yang belum *aware* dengan teman-teman difabel termasuk keluarga difabel itu sendiri yang tidak memperbolehkan anggota keluarganya yang difabel untuk ikut menggunakan hak pilih karena masih banyak keluarga yang merasa

malu mempunyai keluarga seorang penyandang difabel.” (*Wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta tanggal 26 Januari 2018*)

Kurangnya empati dan sensitifitas menjadi permasalahan sendiri dalam penyelenggaraan pemilu, apabila petugas yang menangani secara langsung saat pemilihan tidak mempunyai sensitifitas mereka akan sewenang-wenang dalam memberikan layanan. Harapan dari difabel agar mereka diberikan pelayanan yang adil, adil bukan berarti sama rata karena mereka membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang memadai agar mereka dapat mandiri menggunakan hak-haknya dalam pemilu. KPU Kota Yogyakarta mengakui hal tersebut seperti yang disampaikan oleh ibu Rani sebagai berikut:

“Apalagi badan adhoc kita, penyelenggara kita di kpps perlakuan terhadap pemilih yang berkebutuhan khusus belum sama, belum sadar bagaimana cara memperlakukan mereka, masih ada pemilih tunanetra masih dituntun atau dibantu padahal mereka ingin secara mandiri, harusnya perlakuannya dipandu. Problemnnya adalah pemahaman melayani pemilih difabel itu belum maksimal dipenyelenggaraan pemilu”. (*Wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta tanggal 26 Januari 2018*)

Para petugas-petugas KPPS pada umumnya masih belum mempunyai rasa peka terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sehingga hal ini akan dapat berdampak pada cara-cara mereka dalam menata sebuah ruang TPS dan juga menyiapkan segala hal yang menjadi kebutuhan pemilih disabilitas pada saat pencoblosan yang berlangsung. Kenyataan dilapangannya, saat pemilih disabilitas datang ke lokasi TPS masih terdapat tangga yang harus dilewati oleh pemilih disabilitas. Ini merupakan suatu hambatan bagi mereka yang menggunakan kursi roda, memakai kruk, serta orang tua yang sudah renta. Akan tetapi, masih kurang

pekanya para petugas akan kebutuhan-kebutuhan setiap orang itu berbeda sehingga membuat desain sebuah TPS tidak menjasi TPS yang aksesibel. Dan ini menyebabkan pemilih disabilitas tuna daksa harus diangkat kursi rodanya oleh petugas di TPS.

d. Video simulasi pemungutan suara untuk penyandang tuna rungu.

Inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dalam melakukan sosialisasi pemilu bagi penyandang difabel untuk mengetahui visi-misi calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta yang akan mereka pilih dengan menggunakan metode film. Film ini dibuat dengan durasi pendek yang isinya mengenai gambaran tentang pemilu dimana terdapat pemilih difabel didalamnya serta bagaimana cara petugas KPPS melaksanakan tugasnya dalam membantu dan memperlakukan pemilih difabel dalam menggunakan hak pilihnya. Adanya inovasi menggunakan metode video yang akan diputar pada saat pelaksanaan sosialisasi pemilu bagi penyandang difabel tuna rungu sangatlah penting, dimana mereka akan kesulitan dalam menangkap informasi apabila menggunakan metode komunikasi secara verbal.

Dengan adanya sosialisasi menggunakan video ini mereka akan dapat melihat serta mencerna informasi melalui tiap-tiap adegan dalam video tersebut. Dalam video ini berisikan mengenai informasi-informasi bagaimana proses pemiihan di dalam TPS sehingga dengan adanya inovasi ini diharapkan penyandang tuna rungu tidak akan merasa kebingungan dan kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya. Hal ini seperti disampaikan oleh ibu rani sebagai berikut:

“Kami selaku penyelenggara pemilu membuat suatu media yang ramah bagi teman-teman difabel seperti adanya sosialisasi dengan menggunakan Braille, kemudian membuat film dengan durasi pendek tentang pentingnya menggunakan hak pilih dengan ada interpreturnya kemudian disebar dan dibawa ke setiap PPK sosialisasi juga di proses dengan videotron-videotron yang ada di Kota Yogyakarta”.  
(Wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta tanggal 26 Januari 2018)

Pada pemilu Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta pada tahun 2017 KPU Kota Yogyakarta patut mendapatkan apresiasi karena telah mendengar aspirasi dari kaum disabilitas seperti apa saja yang menjadi kebutuhan mereka yang pada saat pemilu tahun 2014 belum terpenuhi akan dipenuhi oleh KPU Kota Yogyakarta pada Pilwali tahun 2017 dengan semaksimal mungkin penyandang difabel dapat menggunakan hak pilihnya. Dimana pada pemilu tahun 2014 masih belum aksesibelnya tempat pemilihan bagi difabel dalam menggunakan hak pilihnya serta tidak pekannya petugas KPPS dalam melayani pemilih difabel.

Maka dari itu, KPU Kota Yogyakarta tidak hanya mendengar dari penyandang difabel saja namun juga mendengar aspirasi dari pegiat-pegiat difabel seperti SIGAB dan berdiskusi bagaimana desain sosialisasi yang akan dilakukan pada pemilu Walikota Yogyakarta pada tahun 2017 bagi penyandang difabel. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Rani sebagai berikut:

“Pada tahap awal kami mendengar aspirasi dari kaum disabilitas apa saja yang menjadi kebutuhan mereka pada pemilu yang ketika pada tahun 2014 fasilitas tersebut belum dapat dipenuhi oleh KPU kota Yogyakarta. Tidak hanya mendengar dari kaum disabilitas saja KPU kota Yogyakarta banyak berdiskusi dengan pegiat penyandang disabilitas membicarakan desain sosialisasi bagi penyandang disabilitas pada pemilu walikota Yogyakarta 2017, dimana desain sosialisasi tersebut oleh KPU kota Yogyakarta dimasukkan dalam proses perencanaan anggaran”. (Wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta tanggal 26 Januari 2018)

KPU Kota Yogyakarta juga membuat sebuah inovasi yang bekerjasama dengan SIGAB dan gerakan difabel lainnya, diawal tentu saja KPU Kota Yogyakarta berkomitmen mewujudkan pemilukada kota menjadi pemilu yang inklusif, sebelum proses pemungutan suara KPU Kota Yogyakarta secara serentak membuat simulasi pemilu di 14 titik kecamatan secara inklusi, kenapa disebut inklusi karena sosialisasi ini tidak hanya untuk penyandang difabel di adakannya sosialisasi ini merupakan evaluasi dari pemilu Presiden tahun 2014. Pada tahun 2014 KPU Kota Yogyakarta membuat simulasi khusus bagi penyandang difabel di Kota Yogyakarta namun ternyata, pada hari-H pelaksanaan masih banyak penyandang difabel yang merasa bingung karena tidak ada TPS khusus difabel. Hal ini menjadi masukan bagi KPU Kota Yogyakarta pada pemilu di tahun 2017 dengan mengadakan simulasi langsung di 14 kecamatan secara inklusi yang artinya semua jenis kecacatan, semua ragam pemilih diminta untuk mengirimkan salah satu wakilnya dalam simulasi tersebut seperti lansia, penyandang disabilitas, pemilih perempuan serta umum.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat dianalisa bahwa manfaat dalam penemuan analisa ini adalah untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas pada pemilihan umum agar para penyandang disabilitas dapat ikut berpartisipasi guna menggunakan hak pilihnya. Hal ini sesuai dengan kondisi dengan penyandang disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta, dimana mereka masih apatis dan masih kurangnya pemahaman tentang politik. Kompleksitas dari inovasi ini sendiri itu, tidak ada karena KPU Kota Yogyakarta melakukan

sosialisasi agar para pemilih penyandang disabilitas dapat memahami apa yang harus dilakukannya pada saat pencoblosan meskipun belum semuanya. Dan para petugas seperti KPPS, PPS dan PPK juga sudah diberikan arahan dalam materi bimtek agar dapat mengetahui bagaimana cara memperlakukan para pemilih disabilitas. Inovasi ini sudah diaplikasikan sebelumnya pada pemilu tahun 2014 dan pada pemilu tahun 2017 menurut Ibu Widi penyandang disabilitas tuna daksa mengatakan bahwa apa yang sudah KPU Kota Yogyakarta lakukan bagi pemilih penyandang disabilitas sudah sangat bagus dan KPU *care* dengan penyandang disabilitas. Dalam hal pengamatan KPU Kota Yogyakarta bekerjasama dengan sigab dan komunitas pegiat disabilitas lainnya.

## **B. Pengembangan**

Berawal dari pengalaman yang didapat KPU Kota Yogyakarta pada pemilu tahun 2014, pada pemilu Walikota Yogyakarta tahun 2017 KPU Kota Yogyakarta mencoba pemilihan Walikota kota jogja 2017 membahas mengenai perencanaan pemilihan Walikota Kota Yogyakarta, KPU Kota Yogyakarta sebagai perencana kegiatan tersebut dari segi konsep perencanaan sehingga ini bagian dari komitmen dan pemberian fasilitas dari negara untuk penyandang disabilitas pada pemilkada tahun 2017 KPU Kota Yogyakarta agar lebih maksimal dalam memberikan fasilitas pada penyandang disabilitas. Pada pilwali Kota Yogyakarta tahun 2017 ini, KPU Kota Yogyakarta membuat desain pemilu yang ramah bagi penyandang difabel dan menjadikan suatu prioritas pemilu Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta tahun 2017 sebagai pemilu inklusi. Hal ini seperti disampaikan ibu rani dalam wawancara sebagai berikut:

“Pada pemilihan walikota Yogyakarta tahun 2017 kami selaku penyelenggara pemilu membuat desain dan menjadikan prioritas pemilu ini pemilu inklusif dan pada akhirnya KPU Kota Yogyakarta melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pemilu inklusif sebagai bahan dan masukan terkait hal-hal yang belum dapat dilaksanakan pada pemilu inklusif agar pemilu kedepannya berjalan lebih baik”.  
(Wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta tanggal 26 Januari 2018)

Salah satunya dengan mengembangkan inovasi DPT difabel dalam pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017 dengan adanya pengelolaan data DPT bagi penyandang disabilitas sendiri agar tidak tercampur dengan DPT umum. Dengan adanya hal tersebut maka akan mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan data yang didapat pengembangan inovasi ini sebagai salah satu fasilitas yang diberikan KPU Kota Yogyakarta untuk penyandang disabilitas agar tidak ada golput bagi kalangan disabilitas karena terbatasnya fasilitas yang disediakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Rani dalam wawancara sebagai berikut:

“Dengan adanya DPT difabel, KPU kota Yogyakarta memastikan semua pemilih termasuk penyandang disabilitas terdaftar dalam DPT, dengan syarat menjadi pemilih pusat dan mempunyai KTP kota Yogyakarta. Pada data tersebut terdapat 837 penyandang disabilitas yang harus menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut dibuktikan dengan pengecekan data pemilih disabilitas oleh komunitas pegiat difabel, dikarenakan masih terdapat beberapa penyandang disabilitas yang mana setelah di lihat NIK nya penyandang disabilitas tersebut yang seharusnya tercantum di DPT difabel akan tetapi tercantum di DPT umum”. (Wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta tanggal 26 Januari 2018)

Peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik serta sosialisasi bisa dibidang sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang sosialisasi politik yang diembannya. Baik KPU Pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, mempunyai tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan terkait

dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Sosialisasi disini tidak sekedar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedur saja seperti tahapan-tahapan pemilu dan teknis pemilu, akan tetapi juga mencangkup aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang berkompeten. Didalam tugas pokok KPUD Kota Yogyakarta pada poin sebagai penyelenggara yang artinya disini adalah memulai dari tahap mendata pasangan calon, setelah itu, menetapkan pasangan calon, setelah itu mensosialisasikan visi dan misi pasangan calon ke masyarakat.

Didalam kegiatan sebelum pemilihan kepala daerah Kota Yogyakarta tahun 2017 dilaksanakan, KPU telah menyusun rencana sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kaum Disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta. Kegiatan sosialisasi ini merupakan pengenalan pasangan calon kepada masyarakat agar mengerti dan memahami visi dan misi pasangan calon tersebut. KPU sendiri mengemban tugas dalam hal mendongkrak partisipasi masyarakat pada PemiluKada di Kota Yogyakarta. Dari setiap tahunnya kecenderungan masyarakat yang bersikap pasif serta tidak peduli akan sebuah partisipasi dalam politik, banyak sekali terjadi golput suara disabilitas daripada memanfaatkan hak pilih misalnya, atau kurangnya minat mengikuti pemilihan umum khususnya dalam PemiluKada sendiri. Melihat hal itu KPU berinisiatif untuk melibatkan organisasi disabilitas, seperti SIGAB, SAPDA, NARACITA DLL. Keterlibatan organisasi ini akan lebih membantu memvalidkan data penyandang disabilitas. Pengembangan inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta pada

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 terbilang sukses dibandingkan dengan pemilu sebelumnya di tahun 2014 pada pemilukada tahun 2017 ini terdapat peningkatan presentse jumlah dari pemilih penyandang difabel.

Pada pemilu tahun 2014 daftar pemilih tetap dari penyandang disabilitas sebanyak 300 pemilih. Akan tetapi, pada pemilu tahun 2014 peneliti tidak mendapatkan data yang valid mengenai jumlah partisipasi penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum tahun 2014. dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DIFABEL PEMILIHAN**  
**PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 KOTA YOGYAKARTA**

No	Kecamatan	Difabel				Jumlah
		Tuna Fisik	Tuna Netra	Tuna Rungu/Wicara	Disabilitas Lainnya	
1	Danurejan		6	2		8
2	Gedongtengen		9	1		10
3	Gondokusuman	17	22	6		45
4	Gondomanan		4			4
5	Jetis	1	5	3		9
6	Kotagede		9	21		30
7	Kraton	2	5	2	1	9
8	Mantrijeron		9	7		16
9	Mergangsan	2	9	3		14
10	Ngampilan	1	6	4		11
11	Pakualaman		6	1		7
12	Tegalrejo	15	12	45		72
13	Umbulharjo	4	12	6		22
14	Wirobrajan		12	30		42
<b>Jumlah Total</b>		<b>42</b>	<b>126</b>	<b>131</b>		<b>300</b>

Sumber: KPU Kota Yogyakarta 2014

Dapat dilihat dari tabel di atas, pemilih penyandang disabilitas yang terdata dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu tahun 2014 hanya berjumlah 300

pemilih penyandang disabilitas. Jumlah 300 ini, tidak semuanya penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya. Sedangkan pada Pemilihan Walikota Yogyakarta pada tahun 2017 jumlah penyandang disabilitas meningkat dibandingkan dengan pemilu tahun 2014. Hasil ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2**  
**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DIFABEL PEMILIHAN**  
**WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA 2017**

No	Kecamatan	Difabel					Jumlah
		Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu/Wicara	Tuna Grahita	Disabilitas Lainnya	
1	Danurejan	4	3	15	5	2	29
2	Gedongtengen	11	8	14	8	1	42
3	Gondokusuman	16	10	22	26	10	84
4	Gondomanan	19	3	9	4	4	39
5	Jetis	19	10	15	4	10	58
6	Kotagede	24	17	17	28	8	94
7	Kraton	25	10	16	14	5	70
8	Mantrijeron	24	14	11	17	8	74
9	Mergangsan	24	8	17	5	1	55
10	Ngampilan	8	5	10	4	1	28
11	Pakualaman	4	5	4	4	9	26
12	Tegalrejo	11	12	20	16	9	68
13	Umbulharjo	26	16	17	6	2	67
14	Wirobrajan	29	14	33	22	5	103
<b>Jumlah Total</b>		<b>244</b>	<b>135</b>	<b>220</b>	<b>163</b>	<b>75</b>	<b>837</b>

Sumber : KPU Kota Yogyakarta 2017

Dapat dilihat dari tabel di atas, dapat dilihat jumlah pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas hanya berjumlah 837 pemilih penyandang disabilitas. Adanya peningkatan dalam pendataan jumlah pemilih penyandang disabilitas dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Meskipun adanya peningkatan jumlah pemilih akan tetapi penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya hanya 340 penyandang

disabilitas pada Pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 3.3**

**JUMLAH PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA PILWALI KOTA YOGYAKARTA 2017**

No	Kecamatan	Jumlah Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang menggunakan hak pilih	%
1	Danurejan	29	22	75,86
2	Gedongtengen	42	16	38,10
3	Gondokusuman	84	44	52,38
4	Gondomanan	39	17	43,59
5	Jetis	58	12	20,69
6	Kotagede	94	34	36,17
7	Keraton	70	30	42,86
8	Mantrijeron	74	28	37,84
9	Mergangsan	55	23	41,82
10	Ngampilan	28	15	53,57
11	Pakualaman	26	11	42,31
12	Tegalrejo	68	19	27,94
13	Umbulharjo	67	25	37,31
14	Wirobrajan	103	44	42,72
	<b>JUMLAH</b>	<b>837</b>	<b>340</b>	<b>40,62</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 837 jumlah pemilih penyandang disabilitas hanya 340 penyandang disabilitas yang ikut berpartisipasi pada pemilu Walikota Yogyakarta tahun 2017. Hasil angka ini memang belum memuaskan bagi KPU sendiri akan tetapi pada pemilu tahun 2017 jumlah pemilih dan partisipasi dari penyandang disabilitas lebih meningkat dibandingkan pada pemilu sebelumnya.

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dianalisa bahwa manfaat dalam pengembangan yaitu meningkatnya jumlah pemilih dan jumlah partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2017 dibandingkan dengan pemilu tahun 2014. Hal ini sesuai karena adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU

Kota Yogyakarta secara tatap muka kepada penyandang disabilitas dalam upaya memberikan akses informasi-informasi terkait dengan pemilukada 2017. Dalam pengembangan inovasi juga tidak memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Meskipun dalam prosesnya masih terdapat beberapa petugas KPPS yang belum *aware* terhadap penyandang disabilitas. Akan tetapi KPU Kota Yogyakarta sudah memberikan arahan dalam materi bimtek agar dapat mengetahui bagaimana cara memperlakukan para pemilih disabilitas. Inovasi ini sudah diterapkan pada pemilu sebelumnya dan dikembangkan lagi pada pemilu Walikota Yogyakarta tahun 2017 dengan ditambahkan template bagi pemilih disabilitas tuna netra. Pengamatan pengembangan, KPU bekerjasama dengan Sigab guna dapat menciptakan pemilu yang akses dan inklusif bagi para pemilih penyandang disabilitas.

### **C. Duplikasi**

Konsep inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemilu yang inklusif bagi penyandang disabilitas guna dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017 masih tetap berdasarkan pada konsep inovasi pada pemilihan tahun 2014 yaitu dengan adanya DPT difabel. KPU sendiri membuat terobosan dalam Pemilukada 2017 kemarin dengan mengundang seluruh DPS disabilitas untuk memastikan semuanya masuk ke daftar pemilih sementara yang nantinya akan menjadi DPT. Secara berkesinambungan KPU sendiri tentunya juga melibatkan 10 organisasi khusus Penyandang Disabilitas untuk membantu KPU sendiri dalam hal pendataan serta untuk memastikan apakah anggota dari organisasi tersebut sudah

terdaftar semuanya atau belum. Sebab dalam hal ini KPU sendiri masih mempunyai keterbatasan dalam mengakses informasi tentang Penyandang Disabilitas. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Rani sebagai berikut:

“Kami mengundang DPS serta komunitas Difabel yang nantinya menjadi DPT untuk memastikan Kaum Difabel ini sudah benar-benar masuk ke DPS atau belum, dan hasilnya luar biasa ternyata banyak teman-teman yang belum masuk DPS kita. Dan walaupun sudah masuk, tapi tidak masuk dalam DPT Difabel, tapi masuk ke pemilihan umum”. *(Wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta tanggal 26 Januari 2018)*

KPU Kota Yogyakarta memastikan semua pemilih penyandang disabilitas terdaftar dalam DPT difabel, dengan syarat menjadi pemilih pusat dan mempunyai KTP Kota Yogyakarta. Pada data tersebut terdapat 837 penyandang disabilitas yang harus menggunakan hak pilihnya, tetapi dengan data tersebut KPU kota Yogyakarta yakin bahwa belum seluruh penyandang disabilitas yang mempunyai hak pilih terdaftar dalam DPT.

“Dari proses DPS kemudian di DPT kita mendapati peningkatan jumlah Difabel 837, itu pertamanya baru tujuh ratusan, kemudian setelah proses DPS kami verifikasi terus ke organisasi-organisasi Difabel, terus menjadi 837” dengan hasil ini kami masih belum yakin seluruh penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih menggunakan hak pilihnya pada pemilu”. *(Wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta tanggal 26 Januari 2018)*

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya peningkatan jumlah pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta tahun 2017 dibandingkan pada pemilu Presiden tahun 2014. Metode inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta masih sama seperti pada pemilu tahun 2014, di pemilu tahun 2014 masih belum maksimalnya fasilitas yang diberikan oleh KPU dalam memberikan pelayanan yang ramah kepada pemilih penyandang

disabilitas. Melihat dari pemilu tahun 2014, pada pemilu tahun 2017 KPU Kota Yogyakarta mendengar aspirasi dari pemilih penyandang disabilitas apa saja yang menjadi kebutuhan mereka yang masih belum dapat dipenuhi oleh KPU.

Pada pemilu tahun 2014 alat bantu coblos bagi tuna netra hanya terdapat dititik-titik TPS tertentu, namun pada pemilu tahun 2017 alat bantu coblos bagi penyandang tuna netra ada di semua TPS. Karena pada pemilu tahun 2014 inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta menggunakan anggaran pribadi karena tidak ada perintah dari KPU RI serta inovasi tersebut dibuat oleh KPU Kota Yogyakarta sendiri. Akan tetapi pada pemilu tahun 2017 sudah lebih baik karena di semua TPS ada templete bagi pemilih difabel. Kemudian juga pada proses-proses sosialisasi KPU Kota Yogyakarta meminta PPK untuk melibatkan penyandang difabel dalam sosialisasi serta ada *intrepreter* nya karena setiap acara yang diadakan oleh KPU Kota Yogyakarta selalu mengundang penyandang disabilitas. Adanya peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas hal ini yang menjadikan terdapat perbedaan dari inovasi pada pemilu tahun 2014 dan pada pemilu tahun 2017. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Rani sebagai berikut:

“Tingkat partisipasi pada pemilu tahun 2017 meningkat signifikan dibandingkan pada pemilu tahun 2014 dengan catatan masih belum maksimalnya fasilitas yang disediakan bagi penyandang difabel. Inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta pada pemilu tahun 2017 dan pemilu tahun 2014 itu masih sama namun adanya peningkatan skala penyebaran templete pada pemilu tahun 2017”.  
(Wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta tanggal 26 Januari 2018)

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, kemanfaatan pada duplikasi dapat dilihat dari adanya pengoptimalan fasilitas yang disediakan oleh KPU Kota Yogyakarta bagi para pemilih penyandang disabilitas. Dan juga adanya peningkatan dari jumlah pemilih dan partisipasi penyandang disabilitas dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Hal ini sesuai dengan adanya penambahan template bagi pemilih disabilitas tuna netra yang sebelumnya pada pemilu tahun 2014 template yang disediakan hanya terdapat di titik-titik TPS tertentu. Sedangkan pada pemilu tahun 2017 sudah lebih baik karena template tersedia di semua TPS yang terdapat pemilih disabilitas tuna netranya. Sama seperti dengan kompleksitas dari penemuan dan pengembangan, karena kompleksitas dari duplikasi pun tidak memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, semua inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dapat dimengerti dan dipahami meskipun belum secara keseluruhan. Inovasi ini sudah diaplikasikan sebelumnya pada pemilu tahun 2014 dan pada pemilu tahun 2017 menurut ibu Widi penyandang disabilitas tuna daksa mengatakan bahwa apa yang sudah KPU Kota Yogyakarta lakukan bagi pemilih penyandang disabilitas sudah sangat bagus dan KPU *care* dengan penyandang disabilitas. Dalam hal pengamatan KPU Kota Yogyakarta bekerjasama dengan sigab dan komunitas pegiat disabilitas lainnya.

#### **D. Sintetis**

Konsep inovasi terkait dengan pemilu inklusi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 berlandaskan pada pemilu sebelumnya. Inovasi pada pemilu Presiden tahun 2014 terkait konsep serta faktor-faktor yang sudah maupun belum terlaksanakan

diterapkan kembali oleh KPU di pilwali Kota Yogyakarta tahun 2017. Seperti halnya, pada pemilu tahun 2014 alat bantu coblos bagi tuna netra hanya dititik TPS tertentu, namun pada pemilu tahun 2017 alat bantu coblos bagi penyandang tuna netra tersebar di semua TPS se-kecamatan Kota Yogyakarta . Karena pada pemilu tahun 2014 inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta menggunakan anggaran pribadi karena tidak ada perintah dari KPU RI dan inovasi tersebut dibuat oleh KPU Kota Yogyakarta sendiri. Akan tetapi pada pemilu tahun 2017 sudah lebih baik karena di semua TPS ada templete bagi pemilih difabel.

KPU Kota Yogyakarta membuat suatu formulasi sosialisasi yang sesuai dengan penyandang disabilitas, dalam melakukan sosialisasi KPU Kota Yogyakarta bekerjasama dengan para pegiat difabel, inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dalam melakukan sosialisasi bagi penyandang disabilitas untuk mengetahui calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan mereka pilih yaitu dengan membuat visi-misi calon dengan bentuk Braille kemudian disebar ke titik-titik yang terdapat pemilih penyandang disabilitas tuna netra di Yogyakarta yang dibantu oleh pegiat difabel. Disisi lain KPU Kota Yogyakarta meminta tim PPK di kecamatan untuk melakukan sosialisasi difabel dengan melibatkan penyandang difabel diseluruh kecamatan masing-masing agar teman-teman difabel mendapatkan informasi. Disatu sisi, KPU Kota Yogyakarta membuat media yang ramah bagi temen-temen difabel seperti sosialisasi dengan menggunakan Braille, kemudian membuat film dengan durasi pendek tentang pentingnya menggunakan hak pilih dengan ada interpreteur nya kemudian disebar

dan dibawa ke setiap PPK sosialisasi juga di proses dengan videotron-videotron yang ada di Kota Yogyakarta.

Meskipun tidak ada formulasi ataupun konsep inovasi baru, akan tetapi, dari upaya inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas guna dapat ikut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu dinilai mempunyai manfaat yang sangat banyak oleh pemilih penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Widi sebagai berikut:

“Banyak manfaatnya, salah satunya yaitu istilahnya dalam kesempatan untuk penyandang disabilitas ada, ada ruang untuk keterlibatan penyandang disabilitasnya. Kemudian informasi untuk penyandang disabilitasnya kita bisa serah, kemudian saya bisa menularkan informasi tersebut ke teman-teman disabilitas lainnya”. (*Wawancara dengan Ibu Widi penyandang disabilitas tuna daksa dan relawan demokrasi tanggal 13 Maret 2018*)

Hal ini sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas meskipun memang belum menyeluruh seluruhnya, akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta sudah dinilai cukup bagus dalam memenuhi apa yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Widi dalam wawancara sebagai berikut:

“Kalau kebutuhannya memang belum secara menyeluruh akan tetapi, upaya KPU itu sudah cukup luar biasa dalam artian pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. Artinya ketika ada bimtek atau ketika ada training itu KPU selalu menyampaikan kebutuhan penyandang disabilitas itu ini tolong disikapi atau ditindak lanjuti oleh PPK,PPS sampe tingkat KPPS. Dan tanggapan dari beberapa petugas itu sudah lumayan cukup bagus”. (*Wawancara dengan Ibu Widi penyandang disabilitas tuna daksa dan relawan demokrasi tanggal 22 Maret 2018*)

Inovasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta pun tidak memiliki tingkat kerumitan yang tinggi, inovasi ini mudah diterapkan apabila penyelenggara pemilu dalam menyampaikannya dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh para penyandang disabilitas. Dikarenakan inovasi ini juga sudah diuji dan diterapkan oleh KPU Kota Yogyakarta sebelumnya pada pemilu tahun 2014. Menurut ibu Widi KPU Kota Yogyakarta sudah bagus. Dan pada pemilu KPU Kota Yogyakarta bekerjasama dengan sigab guna dapat menciptakan pemilu yang akses dan inklusif bagi para pemilih penyandang disabilitas. Dalam hal ini, sigab mengirimkan kadernya untuk ikut akan jalannya pemilu 2017. Yang mana salah satunya yaitu ibu Widi, dimana beliau ikut terlibat di KPPS.

Berikut adalah rangkaian dari sosialisai pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta selaku penyelenggara pemilu:

1. Melakukan pendataan pemilih penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Dalam melakukan pendataan KPU Kota Yogyakarta selaku penyelenggara pemilu melibatkan para pegiat difabel agar dapat mengetahui berapa jumlah pemilih disabilitas yang masuk dalam data DPS disetiap komunitas ataupun organisasi tersebut. Setelah itu data di DPS didata lagi untuk menjadi DPT.

“kami mengundang teman-teman komunitas pegiat difabel di Kota Yogyakarta untuk dapat memastikan apakah teman-teman difabel yang dimiliki setiap komunitas sudah masuk semua kedalam DPS, dari proses data di DPS kemudian didata lagi agar menjadi DPT dari proses ini kami dapat mengetahui adanya peningkatan jumlah difabel yaitu 837, awalnya berjumlah 700 an, tetapi setelah proses data DPS kami memverifikasi ke komunitas-komunitas pegiat difabel hasilnya menjadi 837. (Wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta tanggal 26 Januari 2018)

Dengan adanya pendataan yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta yang bekerjasama dengan seluruh komunitas pegiat difabel pada pemilu tahun 2017 jumlah pemilih penyandang disabilitas menaik signifikan dibandingkan pada pemilu tahun 2014. Dari pendataan yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta pada pemilu Walikota Yogyakarta tahun 2017 terdapat 837 penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya jumlah tersebut belum dapat dipastikan jika seluruh pemilih penyandang disabilitas terdaftar dalam DPT. Karena KPU Kota Yogyakarta sendiri kesulitan dalam mendata jumlah penyandang disabilitas yang sudah bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

2. Selanjutnya, Pengelompokan penyandang disabilitas sesuai jenis-jenisnya. Setelah data-data pengelompokan penyandang disabilitas terkumpul dan diterima oleh KPU Kota Yogyakarta, selanjutnya, data-data tersebut di evaluasi dan ditindak lanjuti yang tujuannya agar KPU dapat menyiapkan sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat disabilitas pada hari H pencoblosan di setiap TPS-TPS yang terdapat pemilih penyandang disabilitasnya. Seperti untuk pemilih tuna netra akan disediakan templet di TPS serta pemilih tuna daksa yang apabila mengalami kendala pada saat pemilihan akan di bantu oleh para petugas yang berada di TPS dan bagi pemilih tuna rungu dan tuna wicara akan disediakan penerjemah bahasa isyarat.

“Pada hari H pelaksanaan pemilu, kami akan menyediakan templet wajib di 794 TPS Kota Yogyakarta, berbicara soal mengenai aksesibilitas pada saat pemungutan suara jika diperlukan pendamping maka akan kami sertakan, nah bagi pemilih tuna rungu dan tuna wicara itu akan kami sediakan entrepreneur, dan bagi pemilih tuna dakasa sudah kami atur tempat TPS yang sesuai dengan pada saat simulasi yang dilakukan agar dapat memudahkan

pemilih tuna daksa dalam berpartisipasi jika perlu dijemput ya akan dijemput oleh petugas kami”. (*Wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta tanggal 26 Januari 2018*)

KPU Kota Yogyakarta selaku penyelenggara pemilu wajib memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilihnya. Dalam hal ini KPU sendiri sudah menyediakan sarana dan prasarana yang baik sesuai dalam materi bimtek dimana para petugas PPK, PPS, serta KPPS wajib melayani pemilih disabilitas dengan semua jenis kecacatannya agar memudahkan mereka dalam berpartisipasi pada pemilu Walikota Yogyakarta tahun 2017. Jika para petugas PPK, PPS serta KPPS melanggar aturan akan dikenakan sanksi oleh KPU itu dilakukan agar terciptanya pemilu yang inklusi tidak hanya bagi penyandang disabilitas tapi untuk semua masyarakat Kota Yogyakarta karena adanya pemilu inklusi merupakan visi dari KPU Kota Yogyakarta itu sendiri.

3. KPU Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi secara tatap muka dengan pemilih penyandang disabilitas, hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan informasi secara akses terkait dengan Pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017. Dalam proses ini, KPU Kota Yogyakarta mengundang semua pemilih penyandang disabilitas disemua kategori kecacatannya. Agar dapat menghadiri pertemuan sosialisasi yang dilaksanakan pada bulan november tahun 2016.

“Pada tahap ini, kami bekerjasama dengan teman-teman komunitas pegiat difabel yang dibantu mahasiswa serta petugas PPK dan PPS untuk masuk kedalam komunitas. Lalu kami membuat DCT yang berisi visi misi pasangan calon serta visi dari partai pendukung paslon, serta jumlah kursi dari masing masing calon. Terdapat dua pasangan calon lalu kami buat dalam bentuk brail setelah itu kita cetak dan kami bagikan ke pemilih penyandang tuna netra, serta bagi pemilih penyandang tuna rungu kami melibatkan intrepreter, maka dari itu, sosialisasi yang diadakan berbeda untuk

setiap kategori kecacatan”. (*Wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta tanggal 26 Januari 2018*)

Dalam melakukan sosialisasi pemilukada ini, KPU Kota Yogyakarta memiliki cara sendiri dalam menyampaikan materi sosialisasi kepada para pemilih penyandang disabilitas. Bagi pemilih penyandang disabilitas tuna rungu dibuatkan template yang berisikan pasangan-pasangan calon serta visi misi dari pasangan calon. Berbeda dengan penyandang disabilitas tuna rungu, cara KPU Kota Yogyakarta mensosialisasikan pemilu kepada pemilih penyandang tuna daksa yaitu dengan cara mendatangi langsung komunitas penyandang disabilitas tuna daksa, begitupun dengan pemilih penyandang tuna grahita KPU juga mendatangi sekolah SLB secara langsung. Serta sosialisasi pemilukada bagi pemilih tuna rungu KPU mendatangkan langsung penerjemah bahasa isyarat agar mereka dapat memahami apa yang dikatakan orang lain dan juga menampilkan video yang berisi mengenai visi misi dari pasangan calon.

”Saya sendiri selalu berkomunikasi dengan teman teman pegiat difabel karena saya dulunya merupakan salah satu bagian mereka. Proses sosialisasi bagi pemilih tuna grahita kami mendatangi langsung kesekolah SLB. Dan juga kami mendatangi komunitas tuna grahita. Kemudian kami melibatkan teman-teman dari organisasi perempuan dan juga teman difabel yang dalam proses sosialisasi kami melibatkan mereka”. (*Wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta tanggal 26 Januari 2018*)

4. KPU Kota Yogyakarta menyelenggarakan simulasi pada saat pemilu berlangsung

KPU Kota Yogyakarta membuat ring di seluruh kecamatan daerah-daerah mana yang jumlah pemilih difabelnya terbanyak digaris merahi oleh KPU lalu dibagikan dan meminta PPK untuk memperhatikan, memastikan TPS tersebut

dapat diakses serta pemilih difabel dapat menggunakan hak pilihnya. Kemudian juga pada proses-proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta, meminta kepada PPK untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam sosialisasi dan ada intepreternya (penerjemah bahasa) karena setiap acara yang diadakan oleh KPU Kota Yogyakarta selalu mengundang perwakilan dari teman-teman penyandang disabilitas.

Dalam hal sosialisai yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta dalam mengajak dan merangkul penyandang disabilitas oleh ibu Widi selaku penyandang diabilitas tuna daksa itu dinilai sudah cukup bagus. Akan tetapi terdapat beberapa hambatan dalam pensosialisasian dari sisi para penyandang disabilitasnya itu sendiri, seperti penyandang disabilitas yang tidak ikut dalam berorganisasi, tidak diijinkan oleh keluarganya sendiri disabilitas ini tidak akan mendapatkan informasi berbeda apabila penyandang disabilitas itu aktif dalam berorganisasi dia akan mendapatkan informasi mengenai pemilu. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Widi sebagai berikut:

“Ada beberapa hambatan dalam pensosialisasian, ketika penyandang disabilitas tidak terlibat dalam organisasi itu jelas dia akan keterbelakang, kemudian ada penyandang disabilitas yang tidak diijinkan atau keluarganya menyembunyikan, ruang lingkup ini yang hanya dibatasi oleh keluarganya sendiri penyandang disabilitas ini tidak akan pernah menerima informasi dari luar dan hanya mendapat informasi dari keluarganya saja. Dan ketika ada sosialisasi tingkat RT,RW penyandang disabilitas tidak akan keluar untuk hadir. Berbeda dengan penyandang disabilitas yang terlibat didalam keorganisasian informasi tersebut akan sampai”.  
*(Wawancara dengan Ibu Widi penyandang disabilitas tuna daksa dan relawan demokrasi tanggal 22 Maret 2018)*

Dalam melakukan sosialisasi mengenai pemilu kepada penyandang disabilitas KPU bekerjasama dengan para pegiat disabilitas dengan melakukan pendataan

pemilih penyandang disabilitas dan melakukan pengelompokan penyandang disabilitas sesuai jenis-jenisnya. Bekerjasama dengan pegiat disabilitas merupakan upaya dari KPU Kota Yogyakarta untuk memperluas jaringan dalam mengoptimalkan sosialisasi Pemilukada itu sendiri. Akan tetapi banyak sekali penyandang disabilitas yang tidak dapat hadir dalam acara sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kota Yogyakarta. Serta ada yang tidak tertarik untuk mengikuti sosialisasi itu karena mereka menganggap hal itu tidaklah penting serta akses informasi tentang Pemilukada tidak jelas. Pemikiran seperti ini yang ingin dihapuskan oleh KPU dan Organisasi pegiat Disabilitas sebetulnya. Ini merupakan tanda bahwa pemikiran Penyandang Disabilitas tergolong apatis. Golongan Penyandang Disabilitas ini merupakan mereka yang tidak tergabung didalam organisasi atau aktif dalam kegiatan masyarakat. Rata rata mereka malu untuk keluar bahkan untuk masuk ke data pemilih sebagai kategori Disabilitas saja masih enggan untuk menyatakan diri mereka masuk kategori tersebut.

### **3.2 Pemilu Inklusif**

Setiap warganegara termasuk penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada pemilihan wakil-wakil yang mereka pilih yang akan duduk di kursi DPR, DPRD baik provinsi, kota ataupun kabupaten serta anggota DPD melalui pemilu maupun pemilukada di tingkat daerah. Maka dari itu, KPU sebagai penyelenggara baik itu pemilu ataupun pemilukada harus menjamin hak-hak politik warga negara termasuk masyarakat penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih secara langsung pemimpin yang

akan mereka pilih. Untuk dapat mewujudkannya, maka dari itu seluruh tahapan-tahapan pemilu yang dilakukan harus aksesibel bagi semua pemilih khususnya pemilih penyandang disabilitas. Para penyelenggara pemilu menyediakan baik itu sarana maupun prasarana yang aksesibel dalam penyelenggaraan pemilihan umum dalam hal ini bertujuan tidak adanya masalah mobilitas gerak bagi penyandang disabilitas.

Menurut IFES (*International Foundation for Electoral System*) ada beberapa hukum dalam pemilu yang inklusif harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1 Adanya hak pilih yang menyeluruh dan dapat diwakili.

Pemilu akses dapat dilihat dari pertama, pada pemilihan Walikota Yogyakarta tahun 2017 sudah menyeluruhnya hak pilih bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak pilihnya meskipun masih terdapat beberapa masyarakat khususnya penyandang disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya atau biasa disebut golput. Dalam hal ini, pemilih itu bukan diwakili tetapi dibantu dalam menggunakan hak pilihnya oleh keluarga atau petugas KPPS. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Rani sebagai berikut:

“Pemilih disabilitas ini tidak diwakili tetapi dia datang juga ke TPS kemudian ketika akan menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh petugas kami“. (*Wawancara dengan Ibu Rani Komisioner KPU Kota Yogyakarta tanggal 19 Maret 2018*).

## 2 Bagi calon pemilih tidak ada syarat apapun.

Kedua, Tidak ada syarat apapun bagi calon pemilih, yang ada itu syarat seseorang menjadi pemilih dan syaratnya yaitu sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Ini merupakan syarat pada pemilu nasional sedangkan pada pemilihan Walikota Yogyakarta yaitu pemilih harus memiliki KTP Kota Yogyakarta. Syarat tersebut berlaku juga bagi para pemilih penyandang disabilitas. Serta tidak ada syarat tertentu bagi penyandang disabilitas yang menjadi petugas di TPS syaratnya secara umum sama seperti syarat untuk recruitmen yang lain dalam artian kami selalu membuka pendaftaran, membuka kesempatan yang sama baik itu penyandang disabilitas ataupun tidak untuk menjadi penyelenggara pemilu disemua level dan tahapan yang harus dilalui pun sama. Berbeda dengan perempuan, kami membuka suatu afirmasi bahwa ketika kecamatan tersebut belum ada pendaftarnya perempuan maka kami akan memperpanjang masa pendaftaran pada kecamatan tersebut. Namun pada penyandang disabilitas kami tidak memiliki syarat tertentu.

## 3 Solusi untuk TPS yang tidak aksesibel

Ketiga, masih terdapat beberapa TPS yang belum aksesibel karena bikin aksesibel itu untuk Kota Yogyakarta itu sesuatu yang berat dikarenakan untuk akses itu butuh tempat ruang yang cukup luas. Sementara di Kota Yogyakarta itu ruang yang aksesibel sudah menjadi hal yang sulit. Untuk mencari tempat yang datar lapangan itu sudah menjadi masalah sehingga akses di Kota Yogyakarta itu sesuatu yang berat. Saya yakin beberapa TPS masih belum akses tetapi kami dari KPU Kota memastikan ketika ada TPS yang pemilihnya itu disabilitas maka

harus akses itu yang kami tekankan jadi lebih ke kebutuhan pemilih KPPS itu tau betul siapa saja pemilih yang akan menggunakan hak pilih di TPS apakah ada pemilih disabilitasnya atau tidak. Jika terdapat pemilih disabilitas maka dia harus akses jadi tidak bisa disama ratakan karena situasi di kota sangat berbeda. Serta solusi dari TPS yang tidak aksesibel yaitu petugas kami harus membantu pemilih, misalkan ternyata pada TPS itu ada pemilih tuna daksa KPPS sudah berusaha mencari tempat untuk TPS akses tapi tidak mampu tetap saja di pendopo salah satu warga tapi terdapat tangganya itu tidak akses bukan maka dari itu petugas KPPS harus bisa membantu pemilih tadi untuk sampe ke TPS. KPU sudah membekali petugas KPPS seperti bagaimana caranya mendorong kursi roda.

#### 4 Kerahasiaan suara bagi penyandang disabilitas yang dapat juga didampingi

Keempat, kerahasiaan suara bagi penyandang disabilitas yang dapat juga didampingi untuk menjaga kerahasiaan suara ada aturannya bahwa orang yang membantu pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih harus merahasiakan hak pilihnya bahkan ada sanksi dendanya berupa sanksi pidana yang sudah diatur dalam UUD kalau petugas tersebut membocorkannya.

#### 5 Aksesibelnya peralatan untuk pencoblosan

Kelima, Aksesibelnya peralatan untuk pencoblosan, di TPS itu kan hanya ada bilik sama alat coblos justru peralatan untuk pencoblosan hanya itu tapi lingkungan TPS nya itu yang harus dipastikan aksesibel jika alatnya standarnya sudah seperti itu akan tetapi bagi pemilih penyandang disabilitas tuna netra ada alat bantu berupa template itu di TPS yang ada pemilih tuna netranya.

Idealnya TPS akses bagi pemilih penyandang disabilitas yaitu lokasi TPS yang rata dan tidak berundak ataupun bertangga. Lebar untuk pintu TPS yaitu 90 cm guna dapat memberikan akses gerak bagi pemilih yang menggunakan kursi roda. Untuk ukuran dari tinggi meja bilik suara yaitu 75cm dan berongga, untuk dapat mudah dijangkau oleh pemilih yang menggunakan kursi roda tinggi kota suara harus 35cm. Adanya alat bantu coblos bagi pemilih tuna netra di setiap TPS. Serta adanya formulir C3/form bagi penyandang disabilitas yang akan didampingi. TPS pemilu idealnya memang seperti itu, akan tetapi kadang lokasi tidak sama untuk menciptakan TPS yang akses karena seperti yang diketahui, TPS akses inikan hambatannya dilokasi, di Kota Yogyakarta inikan lokasinya sudah terlalu sempit, akhirnya untuk mencari lokasi yang sekiranya bisa dibuat akses itu juga susah. Namun yang terpenting terdapat ruang tunggu, adanya pintu masuk dan pintu keluar sendiri, serta bilik suara yang tidak terlihat dari belakang. Untuk ukuran meja sendiri itu standar yang penting kursi roda bisa masuk pass. Dan untuk meja kotak suara dapat serendah mungkin agar pengguna kursi roda mampu untuk memasukan surat suara serta adanya penyediaan ram yang bukan permanen bagi pengguna kursi roda apabila TPS nya berundak dapat dilihat pada gambar yang terdapat di lampiran. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Widi penyandang disabilitas tuna daksa yang menjadi anggota KPPS.

“Yang terpenting itu ada ruang tunggu, pintu masuk dan keluar sendiri, serta bilik suara tidak terlihat dari belakang. Untuk ukuran meja itu standar yang penting kursi roda bisa masuk pass. Dan untuk meja kotak suara dapat serendah mungkin agar pengguna kursi roda mampu untuk memasukan surat suara serta adanya penyediaan RAM yang bukan permanen bagi pengguna kursi roda”.  
*(Wawancara dengan Ibu Widi penyandang disabilitas tuna daksa dan relawan demokrasi tanggal 22 Maret 2018)*

Dalam mewujudkan pemilu yang inklusif KPU Kota Yogyakarta sudah membuka ruang-ruang yang sangat lebar untuk melibatkan para penyandang disabilitas dalam pemilu. Salah satunya yaitu para penyandang disabilitas dapat ikut terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu seperti menjadi petugas di PPK, PPS ataupun di KPPS. Agar para penyandang disabilitas dapat membantu para petugas KPPS guna dapat mewujudkan semua yang menjadi kebutuhan dari para penyandang disabilitas itu sendiri. Akan tetapi, para penyandang disabilitas masih susah untuk ikut terlibat berpartisipasi dikarenakan masih apatis dan tidak terdukung oleh mobilitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Widi sebagai berikut:

“Sebenarnya KPU itu membuka ruang yang betul-betul lebar untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam pemilu. Salah satunya terlibatlah dalam penyelenggaraan pemilu misalnya tidak di PPK ya di PPS ataupun di KPPSnya. Itu maksudnya dari KPU supaya temen-temen penyandang disabilitas itu bisa membantu KPPS yang lain untuk mewujudkan semua yang menjadi kebutuhan dari temen-temen penyandang disabilitas itu sendiri. Akan tetapi hambatan temen-temen penyandang disabilitas sendiri susah untuk keterlibatan itu dikarenakan apatis, tidak terdukung oleh mobilitas istilahnya seperti saya sendiri kemana-mana tidak bisa sendirian harus ada yang menemani kemudian, ada yang tidak paham dikarenakan belenggu dari kondisi lingkungannya. Sehingga hambatan-hambatan ini terjadi ketika tidak ada dukungan bagi penyandang disabilitas”. (*Wawancara dengan Ibu Widi penyandang disabilitas tuna daksa dan relawan demokrasi tanggal 22 Maret 2018*)

Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Widi dalam wawancara, akan tetapi, apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dalam mengajak dan merangkul para penyandang disabilitas guna dapat mewujudkan pemilu yang akses serta inklusif dapat dinilai sudah cukup bagus. Meskipun belum seluruhnya penyandang

disabilitas dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu. Adanya dukungan dari lingkungan sekitar maupun lingkungan keluarga dari penyandang disabilitas untuk aktif dalam berorganisasi ataupun dalam bermasyarakat akan sangat membantu KPU Kota Yogyakarta dalam memberikam informasi-informasi mengenai pemilu serta dapat memberikan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas.

Sebuah pemilu dapat dikatakan demokratis dan aspiratif jika sudah melaksanakan beberapa syarat seperti sebuah pemilu harus bersifat bersaing, dalam artian pemilu itu harus bebas. Pemilu dilaksanakan secara berkala dengan jarak waktu yang sudah jelas. Pemilu harus inklusif yang artian semua masyarakat tidak hanya penyandang disabilitas saja, akan tetapi masyarakat yang masih terbelakang harus mempunyai peluang yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada deskriminasi dalam proses pelaksanaan pemilu. Pemilu harus akses serta penyelenggara pemilu harus sendiri dan tidak memihak.